**KONSELING: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapannya**
Vol.8, No.1, Oktober 2026, pp. 80-94
e-ISSN: 2686-2875
https://journal.ilininstitute.com/konseling
DOI: 10.31960/konseling.v8i1.3556
Received on 24/08/2026; Revised on 21/09/2026; Accepted on 19/10/2026; Published on: 29/10/2026




# Pelaksanaan, Kendala, dan Strategi Optimalisasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar Tanpa Guru BK Khusus

**Lugina Ronasiva Sunandar [*)1], A. Agustan Arifin[2], Sri Ratnasari[3]**
[1,2,] Bimbingan dan Konseling, Universitas Khairun, Indonesia,
[3] Bimbingan dan Konseling, Universitas Hein Namotemo, Indonesia
*)Corresponding author, E-mail: ronasivasunandar@gmail.com

**Abstract.** his study aims to analyze the implementation of guidance and counseling practices by classroom teachers, identify the challenges encountered, and describe the school's efforts to optimize Guidance and counseling services at SD Negeri 12 Kota Ternate. This study employed a qualitative approach with a descriptive design. Thirteen informants were selected through purposive sampling, consisting of the principal, three classroom teachers from Grades III, IV, and V, and nine students representing the three grade levels. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, and verification. Data validity was established through source and technique triangulation. The findings indicate that Guidance and counseling functions have been implemented through orientation activities, information provision, learning assistance, behavioral guidance, consultation, and mediation. However, these practices remain largely informal, situational, and dependent on classroom teachers' individual initiatives. Group guidance has not been fully implemented as a structured service, while formal individual and group counseling services have not yet been conducted. The main challenges include the absence of dedicated school counselors, limited counseling competencies among classroom teachers, inadequate counseling facilities and rooms, the lack of assessment instruments, and time constraints. The school addresses these challenges through personalized approaches to students and collaboration with external parties. These findings highlight the need to strengthen classroom teachers' competencies, enhance institutional support, provide adequate facilities and resources, and establish referral mechanisms to professional counselors for addressing students' needs beyond classroom teachers' professional competencies. Therefore, the implementation of Guidance and counseling functions in elementary schools needs to be developed in a more systematic, sustainable, and developmentally appropriate manner.

**Keyword:** guidance and counseling; elementary school; classroom teachers; counseling services.

**Abstrak**. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pelaksanaan Bimbingan dan Konselingoleh guru kelas, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mendeskripsikan upaya sekolah dalam mengoptimalkan layanan BK di SD Negeri 12 Kota Ternate. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan dipilih secara *purposive* dan berjumlah 13 orang, terdiri atas kepala sekolah, tiga guru kelas III, IV, dan V, serta sembilan siswa yang masing-masing berasal dari ketiga kelas tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diperiksa menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi BK telah dijalankan melalui kegiatan orientasi, pemberian informasi, pendampingan belajar, bimbingan perilaku, konsultasi, dan mediasi. Namun, pelaksanaannya cenderung informal, situasional, dan bergantung pada inisiatif guru kelas. Bimbingan kelompok belum sepenuhnya dilaksanakan sebagai layanan terstruktur, sedangkan konseling individual dan konseling

kelompok secara formal belum terlaksana. Kendala yang dihadapi meliputi ketiadaan guru BK khusus, keterbatasan kompetensi guru kelas, sarana dan ruang konseling, instrumen asesmen, serta keterbatasan waktu. Sekolah berupaya mengatasi kendala tersebut melalui pendekatan personal kepada siswa dan kerja sama dengan pihak eksternal. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kompetensi guru kelas, dukungan kelembagaan, penyediaan sarana pendukung, serta mekanisme rujukan kepada tenaga profesional untuk menangani kebutuhan siswa yang berada di luar kompetensi guru kelas. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi BK di sekolah dasar perlu dikembangkan secara lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa.

**Kata Kunci**: bimbingan dan konseling; sekolah dasar; guru kelas; layanan BK.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by author.

## Pendahuluan

Bimbingan dan konseling (BK) merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan potensi diri. Pada jenjang sekolah dasar, layanan BK memiliki posisi penting karena peserta didik berada pada tahap perkembangan yang membutuhkan pendampingan dalam mengenali diri, membangun hubungan sosial, mengatasi hambatan belajar, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pelaksanaan layanan BK pada jenjang ini tidak hanya diarahkan untuk menangani permasalahan yang telah muncul, tetapi juga untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan dan kemandirian sesuai dengan tahap perkembangannya. Oleh karena itu, layanan BK perlu menjadi bagian dari proses pendidikan yang dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan.

Urgensi pelaksanaan layanan BK juga berkaitan dengan ketersediaan tenaga profesional yang belum sebanding dengan kebutuhan peserta didik. Laporan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 58 ribu guru BK untuk melayani kurang lebih 45 juta murid. Dengan rasio ideal satu guru BK untuk 150 murid, jumlah tersebut menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antara ketersediaan tenaga BK dan kebutuhan layanan secara nasional (Fitriyana et al., 2025). Data tersebut merupakan gambaran agregat nasional dan tidak secara khusus menunjukkan jumlah guru BK pada jenjang sekolah dasar. Meskipun demikian, kondisi tersebut memberikan konteks mengenai tantangan pemerataan tenaga BK dalam sistem pendidikan Indonesia.

Keterbatasan tenaga profesional juga tercermin dalam sejumlah penelitian pada jenjang pendidikan dasar. (Milenda & Muhroji, 2022)**,** melalui penelitian kualitatif deskriptif di MI Muhammadiyah Unggulan Suruhkalang, mengkaji manajemen layanan BK, kendala pelaksanaannya, dan solusi yang dilakukan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan layanan telah dilakukan melalui identifikasi permasalahan peserta didik dan analisis kondisi sekolah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan guru dalam memberikan layanan BK, serta kerja sama antara kepala sekolah dan guru yang belum berjalan sepenuhnya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan layanan BK tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan program, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana dan dukungan lingkungan sekolah.

Temuan (Nugroho & Fathoni, 2022) melalui penelitian kualitatif deskriptif mengenai hambatan guru berlatar belakang pendidikan non-BK sebagai pelaksana program BK di sekolah dasar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa guru kelas melaksanakan bimbingan pribadi, karier, dan belajar. Namun, guru menghadapi keterbatasan penguasaan kompetensi profesional, pengalaman, serta mekanisme pemberian layanan yang belum terstruktur dan terorganisasi. Layanan cenderung diberikan secara langsung ketika permasalahan muncul. Penelitian tersebut juga mengemukakan perlunya pembekalan kompetensi bagi guru kelas dan penguatan komunikasi dengan orang tua sebagai bagian dari upaya mengatasi hambatan pelaksanaan layanan.

Sementara itu, (Sabillah et al., 2024) mengkaji tantangan guru BK dalam implementasi Kurikulum Merdeka melalui studi pustaka. Kajian tersebut mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, beban kerja, kurangnya pelatihan khusus, serta kendala dalam membangun kerja sama dengan pihak lain. Berbeda dari penelitian (Milenda & Muhroji, 2022; Nugroho & Fathoni, 2022)

yang mengkaji praktik pelaksanaan layanan dalam konteks sekolah tertentu, penelitian (Sabillah et al., 2024) menyajikan sintesis konseptual mengenai tantangan pelaksanaan BK. Dengan demikian, ketiga penelitian tersebut memberikan sudut pandang yang saling melengkapi: aspek pengelolaan layanan dan sarana, kompetensi guru kelas sebagai pelaksana, serta tantangan sumber daya dan koordinasi dalam penyelenggaraan layanan BK

Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan BK di jenjang pendidikan dasar masih menghadapi kendala terkait kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana pendukung, dan pengorganisasian layanan. Namun, kajian-kajian tersebut memiliki fokus yang berbeda, meliputi aspek manajemen layanan, keterbatasan kompetensi guru kelas non-BK, serta tantangan implementasi layanan dalam Kurikulum Merdeka. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik layanan BK pada sekolah dasar tanpa guru BK khusus masih perlu dikaji lebih mendalam sesuai dengan karakteristik dan kondisi empiris masing-masing sekolah.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kesenjangan penelitian dalam artikel ini tidak diletakkan pada anggapan bahwa penelitian terdahulu belum membahas pelaksanaan BK di sekolah dasar, melainkan pada kebutuhan untuk mengkaji keterkaitan antara bentuk-bentuk layanan yang dijalankan, kondisi dan kendala pelaksanaannya, serta upaya optimalisasi dalam satu konteks sekolah dasar yang tidak memiliki guru BK khusus. Namun, penelitian ini diarahkan untuk melengkapi pembahasan tersebut melalui pemetaan praktik layanan yang ditemukan di sekolah, cara guru kelas memberikan pendampingan kepada peserta didik, kendala sumber daya dan sarana yang dihadapi, serta bentuk upaya yang dilakukan sekolah dalam mempertahankan pelaksanaan layanan.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian gambaran empiris yang mengintegrasikan bentuk pelaksanaan layanan BK, karakteristik pendampingan oleh guru kelas, kendala pelaksanaan, dan upaya optimalisasi dalam konteks sekolah dasar tertentu. Kebaruan penelitian bersifat kontekstual dan empiris, yaitu memperlihatkan bagaimana fungsi layanan BK dijalankan dalam kondisi sekolah yang tidak memiliki tenaga BK khusus. Kontribusi tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai pelaksanaan layanan BK di sekolah dasar, khususnya dalam konteks keterbatasan tenaga profesional dan dukungan sarana.

Kesenjangan tersebut relevan untuk dikaji dalam konteks SD Negeri 12 Kota Ternate. Berdasarkan data profil SD Negeri 12 Kota Ternate. sekolah Dasar terakreditasi A dengan jumlah 211 peserta didik dan 15 guru, dan belum memiliki guru BK khusus (5 Maret 2026). Karakteristik tersebut penting untuk dikaji karena keberadaan tenaga pendidik yang menjalankan fungsi pembelajaran tidak serta-merta menunjukkan tersedianya tenaga dengan kompetensi khusus dalam penyelenggaraan layanan BK. Dalam kondisi tersebut, guru kelas memiliki posisi penting dalam memberikan pendampingan kepada peserta didik, sementara pelaksanaan fungsi BK harus berjalan berdampingan dengan tanggung jawab utama guru dalam kegiatan pembelajaran.

Ketiadaan guru BK khusus juga menjadikan aspek kapasitas guru kelas, ketersediaan sarana pendukung, pengaturan waktu, dan dukungan sekolah sebagai hal yang relevan untuk ditelaah. Status akreditasi sekolah yang baik tidak dengan sendirinya menggambarkan terpenuhinya seluruh kebutuhan sumber daya layanan BK. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat keberadaan layanan, tetapi juga memperhatikan bagaimana layanan tersebut dijalankan dalam praktik sehari-hari dan sejauh mana kondisi sekolah mendukung pelaksanaannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SD Negeri 12 Kota Ternate, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta menjelaskan upaya sekolah dalam mengoptimalkan layanan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik layanan BK pada sekolah dasar yang belum memiliki guru BK khusus. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam mengembangkan layanan pendampingan yang lebih terarah, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta didukung oleh peningkatan kapasitas guru dan kerja sama dengan pihak terkait.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling (BK), kendala yang dihadapi, serta upaya sekolah dalam mengoptimalkan layanan berdasarkan kondisi empiris di SD Negeri 12 Kota Ternate. Desain deskriptif kualitatif sesuai digunakan ketika penelitian diarahkan untuk menggambarkan suatu fenomena berdasarkan pengalaman dan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan, dengan tetap mempertahankan kedekatan antara uraian penelitian dan data yang diperoleh (Sandelowski, 2000). Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 12 Kota Ternate, Jalan Yos

Sudarso No. 10, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah. Pengumpulan data berlangsung pada 8–19 Maret 2026.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan relevansinya dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai fenomena yang diteliti (Palinkas et al., 2015)**.** Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang, terdiri atas satu kepala sekolah, tiga guru kelas (kelas III, IV, dan V), serta sembilan siswa yang berasal dari ketiga kelas tersebut. Kepala sekolah dipilih untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan dukungan sekolah terhadap pelaksanaan layanan BK. Guru kelas dipilih karena terlibat langsung dalam memberikan pendampingan kepada siswa, sedangkan sembilan siswa dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam menerima pendampingan dari guru kelas. Masing-masing kelas diwakili oleh tiga siswa.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan selama periode penelitian, yaitu 8–19 Maret 2026, dengan mengamati kondisi lingkungan sekolah, interaksi antara guru dan siswa, serta aktivitas pendampingan yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan BK. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru kelas III, IV, dan V, serta sembilan siswa untuk memperoleh informasi mengenai bentuk pelaksanaan layanan, kendala yang dihadapi, dan upaya sekolah dalam mengoptimalkan layanan BK. Durasi waktu wawancara untuk guru dan siswa selama 30 menit. Proses wawancara didokumentasikan menggunakan rekaman suara. Rekaman tersebut kemudian didengarkan kembali dan dirangkum dalam catatan penelitian sebagai bahan pengolahan dan analisis data. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang meliputi profil sekolah, data siswa, data tenaga pendidik, serta foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian dengan menggunakan pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi yang disusun berdasarkan tiga fokus penelitian, yaitu (1) pelaksanaan layanan BK, (2) kendala dalam pelaksanaan layanan BK, dan (3) upaya sekolah dalam mengoptimalkan layanan BK.

Analisis data dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai, dengan mengacu pada model analisis (Miles et al., 2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap kondensasi data, informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, dirangkum, serta dikelompokkan berdasarkan tiga fokus penelitian. Data mengenai pelaksanaan layanan selanjutnya dikategorikan berdasarkan bentuk layanan BK yang ditemukan dalam penelitian, yaitu layanan orientasi, informasi, pembelajaran, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling individual, konsultasi, mediasi, advokasi, dan bimbingan klasikal. Pengelompokan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian informasi dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi dengan kategori layanan yang dikaji.

Pada tahap penyajian data, informasi disusun secara deskriptif dan tematik dengan memperhatikan bentuk pelaksanaan layanan, pihak yang terlibat, kebutuhan peserta didik, kendala, serta upaya yang dilakukan sekolah. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola dan hubungan antartemuan. Kesimpulan tersebut diverifikasi melalui peninjauan kembali data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data untuk memastikan kesesuaiannya dengan bukti empiris yang diperoleh selama penelitian.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, guru kelas III, IV, dan V, serta siswa. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan beberapa sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat membantu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang dikaji (Carter et al., 2014)**.** Apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti menelusuri kembali data dan konteks yang melatarbelakangi perbedaan tersebut sebelum menetapkan kesimpulan.

Pemeriksaan dilakukan secara berulang selama proses analisis untuk menjaga konsistensi antara data, interpretasi, dan kesimpulan penelitian.

Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan aspek etika, mengingat sebagian informan merupakan siswa sekolah dasar. Sebelum pengumpulan data dilakukan, peneliti telah memperoleh izin penelitian dan persetujuan tertulis dari pihak sekolah. Peneliti juga menjaga kerahasiaan identitas informan serta menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling (BK) di SD Negeri 12 Kota Ternate dilakukan terutama oleh guru kelas yang sekaligus menjalankan tugas pembelajaran. Bentuk kegiatannya mencakup orientasi, informasi, pembelajaran, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, konsultasi, mediasi, advokasi dalam bentuk bantuan langsung, serta bimbingan klasikal. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut belum seluruhnya diselenggarakan sebagai layanan BK yang terencana, terdokumentasi, dan dilaksanakan oleh tenaga profesional. Temuan ini sejalan dengan (Pangestu et al., 2022), yang menjelaskan bahwa layanan BK di sekolah dasar banyak dilaksanakan oleh wali kelas karena guru BK khusus dan waktu layanan tersendiri belum tersedia. (Kurnianto, 2018) juga menemukan bahwa layanan dasar BK di sekolah dasar telah dilaksanakan, tetapi beberapa praktiknya masih belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman operasional layanan BK.

**a. Layanan orientasi**

Layanan orientasi dilaksanakan melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), terutama bagi siswa baru kelas I. Materi pengenalan meliputi lingkungan sekolah, tata tertib, seragam, guru, dan kegiatan sekolah. Kegiatan dilaksanakan melalui pembentukan panitia yang melibatkan guru dan pimpinan sekolah. Guru kelas V menjelaskan:

"Waktu pelaksanaan itu sekitaran seminggu masa pengenalnya." (G-V)

Dari sisi siswa, kegiatan orientasi dipersepsikan sebagai pengalaman awal yang menyenangkan karena memberi kesempatan untuk mengenal lingkungan dan teman baru. Salah satu siswa menyatakan:

"Senang dengan MPLS karena bisa dapat teman baru berkenalan dengan teman baru." (S-1)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa orientasi tidak hanya menyampaikan informasi mengenai aturan sekolah, tetapi juga membantu proses penyesuaian awal siswa terhadap lingkungan sosial dan akademik yang baru. Meski demikian, temuan ini lebih tepat dimaknai sebagai fungsi pengenalan dan fasilitasi adaptasi, bukan bukti bahwa seluruh aspek penyesuaian diri siswa telah tercapai. Praktik orientasi tersebut sejalan dengan pembahasan layanan BK di sekolah dasar oleh (Martanti, 2015; Pangestu et al., 2022), yang menempatkan pengenalan lingkungan serta dukungan guru kelas sebagai bagian penting dari pendampingan peserta didik.

**b. Layanan informasi**

Layanan informasi diberikan melalui penyampaian langsung di kelas, grup WhatsApp orang tua, dan grup komunikasi siswa. Informasi yang disampaikan meliputi tugas sekolah, jadwal libur, seragam, tata tertib, kebersihan, pencegahan perundungan, serta edukasi kesehatan melalui kerja sama dengan pihak luar. Guru kelas V menyampaikan:

"Untuk pemberian informasi saya kebanyakan pake grup WA grup dengan orangtua dan grup siswa." (G-V). Keterangan siswa juga memperlihatkan bahwa informasi diberikan melalui komunikasi digital dan penyampaian langsung oleh guru. Salah satu siswa kelas IV menyatakan: "Ibu kasih informasi langsung di kelas, ada juga di WA, biasanya tentang libur atau ada tugas." (S-2)

Temuan ini menunjukkan bahwa guru menggunakan lebih dari satu saluran komunikasi untuk menjangkau siswa dan orang tua. Materi informasi juga disesuaikan dengan kebutuhan yang dijumpai di lingkungan sekolah, misalnya informasi mengenai kebersihan dan perundungan. Namun, penggunaan grup WhatsApp perlu dipahami sebagai media penyampaian informasi; keberadaannya tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh siswa telah menerima, memahami, dan menindaklanjuti informasi tersebut. Penelitian (Pangestu et al., 2022; Rofiqoh et al., 2023) mendukung pentingnya komunikasi guru dengan siswa dan orang tua serta penyesuaian informasi dengan kebutuhan perkembangan peserta didik di sekolah dasar.

**c. Layanan pembelajaran**

Kegiatan pembelajaran yang ditemukan meliputi penyesuaian materi dengan kemampuan siswa, penggunaan metode yang bervariasi, pengulangan materi, tanya jawab, kerja kelompok, dan pemanfaatan media visual. Guru kelas III menjelaskan:

"Penyesuaian materinya ada pertimbangan karena ada anak yang cepat mengerti ada juga yang susah mengerti." (G-III)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya guru menyesuaikan pembelajaran dengan perbedaan kemampuan siswa. Dalam konteks BK, kegiatan ini dapat dipahami sebagai dukungan terhadap perkembangan dan kesulitan belajar siswa apabila dilakukan dengan tujuan membantu siswa mengenali hambatan belajar dan mengembangkan kebiasaan belajar yang lebih baik. Akan tetapi, pembelajaran reguler tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai layanan BK. Karena itu, dalam penelitian ini kegiatan pembelajaran perlu disebut sebagai praktik pembelajaran yang mengandung fungsi bimbingan, bukan seluruhnya sebagai layanan konseling. (Martanti, 2015; Nichla et al., 2023; Pangestu et al., 2022) menjelaskan bahwa guru kelas di sekolah dasar kerap mengintegrasikan fungsi bimbingan ke dalam kegiatan pembelajaran, termasuk melalui pengulangan materi, penyesuaian metode, dan komunikasi dengan siswa.

**d. Layanan penempatan dan penyaluran**

Layanan penempatan dan penyaluran tampak melalui pengaturan tempat duduk, pembentukan kelompok belajar, serta penyaluran siswa ke kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan yang sesuai dengan minat atau kemampuan. Guru kelas V menjelaskan:

"Untuk posisinya kadang berubah, kadang mereka saya suruh buat kelompok pokonya dikreasikan senyamanya siswa." (G-V)

Siswa menyampaikan bahwa pengaturan tempat duduk dilakukan oleh guru dan pada umumnya mereka merasa nyaman dengan pengaturan tersebut. Penempatan siswa dalam kelompok atau posisi duduk dapat mendukung interaksi dan kerja sama apabila mempertimbangkan kebutuhan belajar, kenyamanan, serta hubungan sosial antarsiswa. (Martanti, 2015) membahas pengaturan dan pendampingan siswa oleh guru kelas sebagai bagian dari praktik BK di sekolah dasar. (Pangestu et al., 2022) juga menempatkan perencanaan individual dan dukungan perkembangan siswa sebagai bagian dari cakupan layanan BK.

Data penelitian menunjukkan bahwa siswa yang dianggap mengganggu dipindahkan ke tempat duduk tertentu. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan rasa malu, pelabelan, atau stigma apabila siswa diberi identitas negatif di hadapan teman-temannya. Oleh sebab itu, penempatan siswa sebaiknya didasarkan pada kebutuhan pembelajaran dan perkembangan sosial, bukan penghukuman atau pelabelan.

**e. Layanan penguasaan konten**

Penguasaan konten dilaksanakan melalui pengulangan materi, penjelasan dengan teknik berbeda, tanya jawab, pemberian soal, dan penggunaan media pembelajaran. Materi yang memerlukan penguatan antara lain pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa, terutama Matematika. Guru menjelaskan bahwa materi diberikan kembali ketika siswa belum memahami penjelasan sebelumnya. Siswa juga menyebutkan penggunaan media visual dan pertanyaan untuk membantu memahami materi.

Kegiatan ini memperlihatkan adanya perhatian guru terhadap kebutuhan belajar siswa. Meskipun demikian, perlu dibedakan antara penguatan materi sebagai bagian dari pembelajaran dan layanan penguasaan konten sebagai layanan BK yang memiliki tujuan pengembangan keterampilan atau kompetensi tertentu. Dalam naskah, istilah layanan penguasaan konten dapat dipertahankan apabila penjelasannya menunjukkan aspek keterampilan belajar, kebiasaan belajar, atau kemampuan yang secara sengaja dikembangkan. (Kurnianto, 2018; Pangestu et al., 2022) dapat digunakan untuk mendukung pembahasan layanan dasar dan pengembangan kompetensi siswa di sekolah dasar.

**f. Layanan bimbingan kelompok**

Bimbingan kelompok dilakukan dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan atau kesamaan karakteristik, misalnya kemampuan membaca, kerja sama, dan kebutuhan penguatan pembelajaran. Guru kelas V menjelaskan:

"Cara pelaksanaannya ini dilihat dulu apakah memang siswa membutuhkan bimbingan kelompok." (G-V)

Guru kelas III juga menerangkan bahwa kegiatan kelompok lebih banyak diarahkan pada latihan membaca dan belajar bersama. Temuan ini perlu ditafsirkan secara hati-hati: sebagian kegiatan yang disebut bimbingan kelompok dalam praktik sekolah ternyata lebih dekat dengan belajar kelompok atau

pendampingan akademik. Kegiatan tersebut baru dapat dipahami sebagai bimbingan kelompok apabila terdapat tujuan pengembangan yang jelas, topik bimbingan, interaksi kelompok yang terarah, dan fasilitasi guru untuk membantu perkembangan pribadi atau sosial siswa.

(Andriani & Hariyani, 2022) menemukan bahwa layanan bimbingan kelompok pada siswa sekolah dasar berhubungan dengan perkembangan perilaku sosial-emosional, seperti berbaur dengan teman, membuka diri, dan mempercayai teman. Hasil tersebut relevan untuk menjelaskan potensi kegiatan kelompok di SD Negeri 12 Kota Ternate, tetapi tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa kegiatan kelompok di sekolah ini telah menghasilkan dampak yang sama karena penelitian ini tidak mengukur dampak tersebut.

**g. Layanan konseling kelompok**

Berdasarkan wawancara, layanan konseling kelompok belum dilaksanakan secara formal dan terstruktur. Beberapa kegiatan yang melibatkan sejumlah siswa lebih berupa pengarahan, nasihat, atau penyelesaian masalah secara umum. Guru kelas IV menyatakan:

"Konseling kelompok ini belum pernah saya lakukan untuk siswa yang ada masalah seperti kesulitan mengelola emosi itu belum pernah saya lakukan." (G-IV)

Pernyataan tersebut menjadi bukti penting bahwa kegiatan kelompok yang ditemukan tidak dapat langsung dikategorikan sebagai konseling kelompok. Konseling kelompok memerlukan proses bantuan yang lebih terarah, tujuan konseling, tahapan pelaksanaan, dan kompetensi konselor. Temuan ini sejalan dengan (Haryani et al., 2024)yang mengidentifikasi bahwa pelaksanaan BK di sekolah dasar masih memerlukan pengembangan pemahaman dan kapasitas guru kelas. (Andriani & Hariyani, 2022) dapat digunakan untuk menjelaskan potensi bimbingan kelompok bagi perkembangan sosial-emosional, tetapi bukan sebagai bukti bahwa konseling kelompok telah terlaksana di lokasi penelitian.

**h. Layanan konseling individual**

Layanan konseling individual belum dilaksanakan di SD Negeri 12 Kota Ternate. Guru kelas mengakui bahwa keterbatasan pemahaman mengenai teknik konseling dan ketiadaan guru BK khusus membuat mereka belum melakukan layanan tersebut. Guru kelas IV menyatakan:

"Untuk konseling nih belum pernah karena di sekolah ini juga belum ada guru Bk jadi kami juga untuk konseling begini belum dilakukan." (G-IV)

Kepala sekolah juga mengemukakan perlunya tenaga BK untuk menangani persoalan siswa secara lebih profesional:

"Menurut saya perlu yah malahan lebih bagus lagi supaya siswa yang punya masalah seperti perkelahian bisa ditangani oleh guru BK." (KS)

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kesadaran pihak sekolah mengenai kebutuhan tenaga profesional. Nasihat atau percakapan singkat antara guru dan siswa tidak dapat serta-merta disebut konseling individual karena tidak ditemukan bukti pelaksanaan proses konseling individual yang terstruktur. Oleh sebab itu, kasus yang melampaui kapasitas guru kelas perlu dirujuk atau dikonsultasikan kepada tenaga profesional dan pihak terkait sesuai kebutuhan siswa. (Rofiqoh et al., 2023; Sukadari, 2021; Syahrul, 2024) mendukung pentingnya penguatan peran profesional serta kolaborasi dalam pelaksanaan BK di sekolah dasar.

**i. Layanan konsultasi**

Kegiatan konsultasi berlangsung secara informal, terutama ketika siswa mengalami kesulitan memahami materi atau membutuhkan penjelasan mengenai tugas sekolah. Konsultasi dilakukan dengan guru kelas, umumnya setelah pembelajaran atau ketika situasi kelas lebih tenang. Guru kelas menyebutkan bahwa siswa yang belum memahami materi dapat bertanya secara langsung dan kemudian memperoleh penjelasan ulang. Praktik tersebut memperlihatkan adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Akan tetapi, berdasarkan data, konsultasi yang paling jelas ditemukan berpusat pada persoalan belajar. Karena itu, naskah tidak perlu menyatakan bahwa layanan konsultasi telah menangani persoalan pribadi siswa secara luas. Ketiadaan ruang khusus juga perlu dicatat sebagai keterbatasan, terutama ketika siswa membutuhkan privasi. (Pangestu et al., 2022; Rofiqoh et al., 2023) mendukung pentingnya komunikasi dan kerja sama guru dengan siswa maupun orang tua dalam pendampingan peserta didik.

**j. Layanan mediasi**

Layanan mediasi merupakan salah satu bentuk penanganan masalah yang paling sering ditemukan. Mediasi dilakukan ketika terjadi konflik antarsiswa, seperti saling mengejek, salah paham, atau perselisihan. Guru memanggil pihak yang terlibat dan, bila diperlukan, saksi untuk mendengarkan keterangan masing-masing sebelum mencari penyelesaian. Guru kelas V menyatakan:

"Kalo kegiatan mediasi ini sering yah apalagi anak kecil setiap minggunya tu akan ada sudah yang harus dimediasi." (G-V). Salah satu siswa juga menjelaskan pengalaman ketika guru membantu menyelesaikan perselisihan: "Ibu suruh jelaskan apa yang terjadi, kemudian Ibu kasih solusi." (S-3)

Data menunjukkan bahwa guru berupaya mendengarkan pihak-pihak yang terlibat dan mencari jalan tengah. Praktik ini dapat mendukung pembelajaran keterampilan sosial, seperti mendengarkan, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan konflik. Namun, penelitian ini tidak mengukur perubahan perilaku jangka panjang, sehingga tidak tepat menyatakan bahwa mediasi terbukti mengurangi konflik secara permanen. Sebagai pembanding, literatur mengenai layanan mediasi menjelaskan pentingnya proses netral dan terarah dalam menangani konflik peserta didik. Untuk konteks sekolah dasar, temuan (Rofiqoh et al., 2023; Syahrul, 2024) dapat digunakan untuk mendukung pembahasan mengenai penanganan masalah dan kolaborasi dalam layanan BK.

**k. Layanan advokasi**

Temuan mengenai advokasi menunjukkan adanya bantuan langsung dari guru kepada siswa yang mengalami kebutuhan tertentu, misalnya siswa yang tidak membawa bekal atau uang jajan. Salah satu guru menyatakan: "Palingan kalo siswa tidak bawa uang jajan saya kasih saja uang jajan dan kasih makanan saja." (G-III).

Temuan tersebut memperlihatkan kepedulian guru terhadap kebutuhan siswa. Namun, bantuan langsung tersebut belum cukup untuk dikategorikan sebagai layanan advokasi BK yang sistematis. Advokasi dalam konteks BK mencakup upaya membantu peserta didik memperoleh haknya, mengatasi hambatan, dan memastikan kebutuhan pendidikannya terpenuhi melalui langkah yang terencana. Rofiqoh et al. (2023) dan Syahrul (2024) dapat digunakan untuk membahas pentingnya kerja sama dan dukungan pihak lain dalam membantu memenuhi kebutuhan peserta didik.

**l. Layanan bimbingan klasikal**

Bimbingan klasikal dilaksanakan kepada seluruh siswa di kelas dengan materi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kelas. Topik yang diberikan antara lain akhlak, sopan santun, kebersihan, perilaku saling menghargai, dan permasalahan yang muncul dalam interaksi siswa. Guru kelas V menyatakan:

"Bimbingan klasikal ini saya lebih banyak ke akhlak terus kalo saya pribadi saya ajarkan bagaimana mereka berperilaku, cara berbicara dengan sopan." (G-V)

Kegiatan ini menunjukkan bahwa guru memberikan penguatan nilai dan perilaku secara bersama-sama. Agar dapat dibedakan dari pengelolaan kelas biasa, bimbingan klasikal perlu dijelaskan berdasarkan tujuan pengembangan pribadi dan sosial siswa, materi yang diberikan, serta kesesuaian dengan tahap perkembangan anak. (Bilqis, 2019) membahas pengembangan program bimbingan klasikal untuk meningkatkan daya tarik interpersonal siswa kelas V SD. (Kurnianto, 2018) juga menempatkan layanan dasar sebagai bantuan bagi seluruh siswa dalam pengembangan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier.

Secara umum, pelaksanaan BK di SD Negeri 12 Kota Ternate memperlihatkan bahwa guru kelas telah menjalankan berbagai fungsi bimbingan melalui kegiatan pengenalan lingkungan, penyampaian informasi, pendampingan belajar, pengaturan interaksi siswa, bimbingan kelompok, konsultasi informal, mediasi konflik, bantuan langsung, dan bimbingan klasikal. Akan tetapi, kegiatan tersebut belum seluruhnya dapat dikategorikan sebagai layanan BK formal karena sebagian masih terintegrasi dengan pembelajaran dan pengelolaan kelas. (Martanti, 2015; Pangestu et al., 2022; Sukadari, 2021) yang menunjukkan bahwa guru kelas memiliki peran penting dalam mendampingi peserta didik sekolah dasar, tetapi pelaksanaan BK tetap membutuhkan dukungan tenaga profesional, kompetensi, perencanaan, dan sistem layanan yang memadai.

**Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling**

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling (BK) di SD Negeri 12 Kota Ternate masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi keteraturan dan kualitas layanan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kendala tersebut meliputi ketiadaan guru BK profesional, keterbatasan kompetensi guru kelas dalam teknik konseling, keterbatasan sarana dan prasarana, belum tersedianya instrumen asesmen standar, kurang terbukanya sebagian siswa ketika menghadapi masalah, miskomunikasi dengan orang tua, serta keterbatasan waktu guru kelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BK masih sangat bergantung pada inisiatif guru kelas dan belum didukung oleh sistem layanan yang terstruktur.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Nugroho & Fathoni, 2022), yang menemukan bahwa guru kelas berlatar belakang pendidikan non-BK menghadapi keterbatasan kompetensi profesional, pengalaman,

dan pemahaman terhadap mekanisme layanan BK. (Haryani et al., 2024) juga menunjukkan bahwa pemahaman guru kelas terhadap layanan BK di sekolah dasar masih terbatas dan pelaksanaannya belum terencana secara optimal. Dengan demikian, kendala yang ditemukan di SD Negeri 12 Kota Ternate tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan individu guru, tetapi juga berhubungan dengan dukungan kelembagaan dan ketersediaan sistem pelayanan.

**a. Ketiadaan Guru BK Profesional dan Keterbatasan Kompetensi Guru Kelas**

Kendala utama dalam pelaksanaan layanan BK di SD Negeri 12 Kota Ternate adalah belum tersedianya guru BK profesional. Seluruh kegiatan pendampingan siswa dilaksanakan oleh guru kelas yang memiliki tugas utama mengajar sekaligus menjalankan fungsi pembimbingan. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan masalah siswa lebih banyak dilakukan melalui pendekatan langsung, pemberian nasihat, teguran, dan mediasi sederhana. Keterbatasan tersebut juga terlihat ketika guru harus menghadapi permasalahan siswa yang membutuhkan penanganan lebih mendalam. Salah seorang guru kelas IV mengungkapkan:

"Untuk konseling nih belum pernah karena di sekolah ini juga belum ada guru Bk jadi kami juga untuk konseling begini belum dilakukan. Saya juga takut karena tidak terlalu paham. Palingan yang berkelahi iu di mediasi saja atau yang menyontek ka itu di nasehatin saja." (G-IV)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan kompetensi bukan sekadar persoalan pengetahuan teoritis, melainkan juga berkaitan dengan rasa kurang percaya diri guru dalam menerapkan teknik konseling. Guru memilih bentuk penanganan yang dianggap lebih dikuasai, seperti menasihati dan memediasi siswa. Hal ini menjelaskan mengapa layanan yang membutuhkan keterampilan khusus, terutama konseling individual, belum dapat dilaksanakan secara formal.

Kepala sekolah juga menyampaikan kebutuhan terhadap tenaga BK profesional:

"Menurut saya perlu yah malahan lebih bagus lagi supaya siswa yang punya masalah seperti perkelahian bisa ditangani oleh guru BK. Seperti SMP dan SMA di sanakan ada guru BK. Yang kita tau sekarang di SD itu tidak ada guru BK." (KS)

Pernyataan kepala sekolah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga BK telah disadari oleh pihak sekolah. Akan tetapi, pemenuhan tenaga BK tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan guru kelas maupun kepala sekolah karena berkaitan dengan kebijakan penyediaan sumber daya manusia pendidikan.

Dari sudut pandang analitis, ketiadaan guru BK profesional menyebabkan fungsi bimbingan lebih dominan bersifat responsif dan insidental. Guru kelas dapat membantu persoalan sederhana yang muncul dalam kegiatan belajar dan interaksi sehari-hari, tetapi penanganan persoalan yang berkaitan dengan kondisi psikologis, sosial-emosional, atau perilaku yang kompleks memerlukan kompetensi dan prosedur penanganan yang lebih khusus. Oleh karena itu, guru kelas perlu didukung melalui pelatihan, supervisi, dan mekanisme konsultasi atau rujukan kepada tenaga profesional.

Temuan ini memiliki kesesuaian dengan (Nugroho & Fathoni, 2022) yang menyatakan bahwa guru kelas non-BK masih menghadapi hambatan dalam penguasaan kompetensi profesional dan pelaksanaan layanan secara terstruktur. (Haryani et al., 2024) juga menekankan perlunya model layanan BK yang dapat membantu guru kelas memahami dan memenuhi kebutuhan perkembangan siswa sekolah dasar.

**b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana serta Instrumen Asesmen**

Kendala berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan layanan BK. Sekolah belum memiliki ruang khusus konseling sehingga guru menggunakan ruang kelas atau tempat lain yang tersedia untuk berkomunikasi dan memberikan pendampingan kepada siswa. Selain itu, ketersediaan media pendukung dan instrumen asesmen standar untuk mengidentifikasi kebutuhan maupun permasalahan siswa juga masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan konsultasi atau pendampingan belum sepenuhnya dapat dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi siswa. Ruang kelas merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar bersama sehingga percakapan yang membahas persoalan pribadi berpotensi terdengar atau diketahui siswa lain. Hal ini dapat membuat siswa merasa kurang nyaman untuk menyampaikan permasalahan secara terbuka.

Keterbatasan instrumen asesmen juga berdampak pada proses identifikasi masalah. Guru cenderung mengandalkan pengamatan langsung dan pengalaman dalam memahami perilaku siswa. Pendekatan tersebut tetap memiliki nilai dalam mengenali perubahan perilaku sehari-hari, tetapi belum cukup untuk menggantikan proses identifikasi yang lebih sistematis apabila siswa mengalami masalah yang kompleks.

Penelitian (Khoeriyah, 2024) mengenai infrastruktur manajemen BK di sekolah dasar menunjukkan bahwa ketersediaan ruang konseling dan tenaga ahli masih menjadi persoalan di sejumlah sekolah dasar. Penelitian (Santika et al., 2024) juga menjelaskan bahwa keterbatasan sarana dapat menghambat optimalisasi pelaksanaan layanan BK. Dengan demikian, temuan di SD Negeri 12 Kota Ternate

memperlihatkan bahwa sarana dan prasarana bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan bagian dari kondisi yang memengaruhi kenyamanan, kerahasiaan, dan keteraturan pelayanan.

**c. Keterbatasan Waktu dan Beban Kerja Guru Kelas**

Guru kelas memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan pembelajaran, menyiapkan administrasi, mengevaluasi hasil belajar, serta mengelola kondisi kelas. Di sisi lain, guru juga harus memberikan pendampingan kepada siswa yang mengalami permasalahan akademik maupun sosial. Peran ganda tersebut menyebabkan layanan BK belum dapat dilaksanakan secara konsisten dengan jadwal dan perencanaan khusus.

Hasil observasi menunjukkan bahwa guru kelas belum menyusun rencana pelaksanaan layanan (RPL) BK secara lengkap. Salah satu penyebab yang tercatat dalam catatan observasi adalah beban administrasi pembelajaran yang tinggi, disertai keterbatasan pemahaman guru dalam menyusun perencanaan layanan. Penanganan masalah siswa pada akhirnya lebih sering dilakukan secara spontan sesuai situasi yang muncul di kelas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan siswa dan kapasitas waktu guru. Ketika pendampingan dilakukan secara spontan, guru dapat merespons masalah yang sedang terjadi, tetapi tindak lanjutnya berisiko tidak terdokumentasi dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, perkembangan siswa setelah memperoleh bantuan juga lebih sulit dipantau secara sistematis.

Penelitian (Syahrul, 2024) mengenai pelaksanaan BK di SD Inpres Mallengkeri Bertingkat menemukan bahwa keterbatasan waktu dan beban kerja ganda menjadi hambatan bagi guru kelas dalam melaksanakan layanan BK. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa optimalisasi layanan tidak cukup hanya mengandalkan kemauan guru, tetapi juga memerlukan pengaturan beban kerja dan dukungan program dari sekolah.

**d. Kurangnya Keterbukaan Siswa dalam Menyampaikan Permasalahan**

Kendala lainnya adalah sebagian siswa belum sepenuhnya terbuka ketika menghadapi masalah. Kondisi ini berkaitan dengan karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar yang masih membutuhkan rasa aman dan kepercayaan terhadap orang dewasa ketika menyampaikan pengalaman atau kesulitan yang dialaminya. Keterbukaan siswa merupakan unsur penting dalam proses bimbingan. Apabila siswa merasa takut, malu, atau khawatir akan mendapatkan teguran, guru akan mengalami kesulitan dalam memahami persoalan yang sebenarnya terjadi. Dalam situasi demikian, guru mungkin hanya mengetahui perilaku yang tampak, sedangkan faktor yang melatarbelakanginya belum tentu teridentifikasi. Oleh karena itu, pendekatan guru perlu mengutamakan komunikasi yang ramah, tidak menghakimi, dan sesuai dengan usia siswa. Guru juga perlu membedakan antara perilaku yang perlu dikoreksi dan kebutuhan anak untuk didengarkan. Upaya tersebut penting agar siswa tidak memandang kegiatan bimbingan sebagai bentuk hukuman. (Haryani et al., 2024) menegaskan pentingnya pemahaman guru terhadap kebutuhan perkembangan siswa sekolah dasar. Sementara itu, penelitian (Nasrudin et al., 2025) menunjukkan bahwa kolaborasi wali kelas dengan guru BK dapat membantu proses identifikasi permasalahan dan penyusunan tindak lanjut bagi peserta didik.

**e. Miskomunikasi dan Koordinasi dengan Orang Tua**

Hubungan antara sekolah dan orang tua merupakan unsur penting dalam pendampingan siswa. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kendala komunikasi, khususnya ketika informasi dari sekolah tidak tersampaikan secara utuh atau ketika pemahaman orang tua terhadap permasalahan anak berbeda dengan penjelasan guru. Miskomunikasi dapat memengaruhi kesinambungan pendampingan karena pembinaan yang dilakukan di sekolah membutuhkan dukungan lingkungan keluarga. Ketika informasi tidak diterima atau dipahami secara tepat, tindakan yang dilakukan guru dan orang tua berpotensi tidak sejalan. Akibatnya, pembiasaan perilaku yang diharapkan sekolah tidak selalu memperoleh penguatan di rumah.

Dalam salah satu wawancara, guru kelas menjelaskan bentuk koordinasi dengan orang tua sebagai berikut:

"Kadang apa yang dilakukan anak itu pengaruh dari lingkunganya yang saya lihat lingkungan rumahnya lingkungan pertemananya jadi saat di berkata kasar sih itu pengaruhnya dari situ. Jadi saya buat kesepakatan dengan orang tua saya bombing dia di sekolah orang tua juga harus bimbing di rumah jadi biasanya sebelum pulang sekolah 10-15 menit itu saya bimbing mereka." (G-V)

Kutipan tersebut menunjukkan adanya upaya guru untuk menyelaraskan pendampingan di sekolah dan di rumah. Namun, pernyataan tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pendampingan tidak hanya bergantung pada guru, tetapi memerlukan keterlibatan keluarga secara berkelanjutan(Purwaningrum

et al., 2023) juga menempatkan kolaborasi guru BK dan orang tua sebagai unsur penting dalam mendukung perkembangan peserta didik serta mencegah munculnya permasalahan di sekolah.

**3. Upaya Sekolah dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling**

Meskipun menghadapi berbagai kendala, SD Negeri 12 Kota Ternate telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung pelaksanaan layanan BK. Berdasarkan hasil penelitian, upaya tersebut dilakukan melalui dua bentuk, yaitu upaya internal yang dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah serta upaya eksternal melalui kerja sama dengan pihak di luar sekolah. Upaya internal mencakup pemanfaatan teknologi, penggunaan variasi metode pembelajaran, pengaturan tempat duduk, pembiasaan perilaku positif, dan pemberian penguatan kepada siswa. Sementara itu, upaya eksternal dilakukan melalui kerja sama dengan Puskesmas, Kepolisian, dan Perpustakaan. Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa sekolah berusaha memenuhi kebutuhan siswa dengan sumber daya yang tersedia. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian (Nasrudin et al., 2025), yang menekankan pentingnya kolaborasi antara wali kelas dan guru BK dalam pelaksanaan layanan di sekolah dasar. Penelitian (Syahrul, 2024) juga menunjukkan bahwa pendekatan persuasif, motivasional, dan penguatan kompetensi guru dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan BK.

**a. Upaya Internal**

**1) Pemanfaatan Teknologi sebagai Media Pendukung Layanan**

Guru kelas memanfaatkan teknologi untuk membantu penyampaian materi pembelajaran dan informasi kepada siswa. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah penggunaan media audio visual, proyektor, serta aplikasi pendukung pembuatan materi pembelajaran. Guru juga menggunakan grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi kepada siswa dan orang tua. Selain itu, pemanfaatan video call digunakan untuk membantu komunikasi mengenai pembelajaran di luar jam sekolah. Penggunaan teknologi tersebut menunjukkan upaya guru dalam memperluas akses komunikasi dan memberikan pendampingan ketika siswa membutuhkan penjelasan tambahan. Pemanfaatan grup WhatsApp juga didukung dengan keterlibatan siswa yang dipercaya membantu mengelola grup dan meneruskan pertanyaan kepada guru. Praktik ini menunjukkan adanya upaya membangun tanggung jawab dan kemandirian siswa, sekaligus membantu guru mengelola komunikasi.

Namun, pemanfaatan teknologi perlu dipahami sebagai media pendukung, bukan pengganti layanan konseling. Komunikasi digital dapat membantu penyampaian informasi dan konsultasi akademik, tetapi persoalan pribadi yang membutuhkan kerahasiaan dan pendalaman tetap memerlukan interaksi yang tepat serta perlindungan privasi siswa. Penelitian (Prihatiningsih et al., 2025) menunjukkan bahwa guru kelas dapat mengintegrasikan berbagai strategi pembelajaran dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan BK di sekolah dasar. Temuan (Haryani et al., 2024) juga menegaskan bahwa pengembangan layanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi guru kelas.

**2) Penerapan Variasi Metode Pembelajaran**

Upaya berikutnya dilakukan melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga menerapkan diskusi kelompok, tanya jawab, Problem Based Learning (PBL), kerja kelompok, penggunaan alat peraga, permainan, dan *ice breaking*. Variasi tersebut dilakukan untuk mengurangi kejenuhan siswa, mempertahankan perhatian, serta membantu siswa memahami materi sesuai kemampuan masing-masing. Ketika siswa terlihat bosan atau kurang fokus, guru menggunakan permainan atau kegiatan penyegar suasana agar siswa dapat kembali terlibat dalam pembelajaran.

Dari perspektif BK, variasi metode pembelajaran dapat mendukung perkembangan sosial dan belajar siswa, terutama ketika kegiatan dirancang untuk melatih kerja sama, komunikasi, tanggung jawab, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Akan tetapi, kegiatan pembelajaran tersebut tidak otomatis merupakan layanan konseling. Nilai bimbingannya terletak pada tujuan pengembangan diri dan keterampilan siswa yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Temuan tersebut sejalan dengan (Nugroho & Fathoni, 2022) yang menjelaskan bahwa guru kelas dapat menjalankan fungsi bimbingan melalui kegiatan pembelajaran. (Prihatiningsih et al., 2025) juga menunjukkan bahwa integrasi materi BK ke dalam pembelajaran umum menjadi salah satu strategi yang digunakan guru kelas di sekolah dasar.

**3) Pengaturan Tempat Duduk dan Penerapan Tutor Sebaya**

Guru juga melakukan pengaturan tempat duduk berdasarkan kondisi dan kebutuhan siswa. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menempatkan siswa yang memiliki kemampuan akademik lebih baik bersama siswa yang masih membutuhkan bantuan. Guru juga mengatur posisi siswa yang aktif agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung lebih kondusif. Strategi tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep tutor

sebaya, yaitu pemanfaatan interaksi antarsiswa untuk membantu proses belajar. Melalui pengaturan ini, siswa berkesempatan saling membantu, membangun kepedulian, dan mengembangkan keterampilan sosial.

Namun, pengaturan tempat duduk perlu dilakukan secara fleksibel dan tidak menimbulkan pelabelan terhadap siswa. Siswa yang mengalami kesulitan belajar sebaiknya tidak diposisikan sebagai siswa yang lebih rendah, melainkan sebagai peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar berbeda. Oleh sebab itu, pengaturan tempat duduk perlu mempertimbangkan kenyamanan, hubungan sosial, dan kebutuhan perkembangan siswa. Dalam konteks ini, pengaturan tempat duduk dapat dipahami sebagai strategi pendukung pembelajaran dan interaksi sosial, bukan sebagai pengganti layanan BK individual.

**4) Penanaman Nilai Karakter dan Pembiasaan Perilaku Positif**

Sekolah juga berupaya mengoptimalkan fungsi bimbingan melalui penanaman nilai karakter dan pembiasaan perilaku positif. Guru secara berkelanjutan mengingatkan siswa mengenai kebersihan, kerapian, akhlak, sopan santun, dan tanggung jawab. Penguatan perilaku dilakukan melalui pengingat, teguran, pujian, ucapan terima kasih, serta apresiasi kepada siswa yang menunjukkan perilaku positif atau prestasi. Upaya tersebut diarahkan untuk membentuk kebiasaan yang sesuai dengan nilai dan aturan sekolah.

Pembiasaan yang dilakukan secara berulang dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter karena siswa memperoleh kesempatan untuk memahami dan mempraktikkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perubahan perilaku tidak dapat diasumsikan terjadi secara permanen hanya karena siswa telah memperoleh teguran atau nasihat. Penguatan perlu dilakukan secara konsisten, disertai keteladanan guru dan dukungan lingkungan keluarga. Dalam konteks ini, kegiatan pembiasaan memiliki fungsi preventif, yaitu membantu siswa mengenali perilaku yang diharapkan sebelum masalah berkembang lebih jauh. (Haryani et al., 2024) menekankan pentingnya layanan bimbingan yang mendukung perkembangan siswa, sedangkan penelitian (Rahmawati et al., 2024) menggarisbawahi kebutuhan kolaborasi guru kelas, guru BK, dan orang tua dalam membantu siswa menyelesaikan tugas perkembangannya.

**b. Upaya Eksternal melalui Kolaborasi dengan Pihak Luar**

**1) Kerja Sama dengan Puskesmas**

Sekolah menjalin kerja sama dengan Puskesmas Kota dalam kegiatan imunisasi dan edukasi kesehatan yang dilaksanakan secara rutin. Materi edukasi meliputi cara mencuci tangan, gizi seimbang, dan pencegahan penyakit. Kegiatan tersebut mendukung pemenuhan kebutuhan informasi dan pemeliharaan kesehatan siswa. Dalam konteks BK, kerja sama ini dapat dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan peserta didik secara menyeluruh, khususnya dalam aspek kesehatan dan kebiasaan hidup sehat. Meskipun demikian, kegiatan edukasi kesehatan tidak dapat langsung dikategorikan sebagai konseling. Kegiatan tersebut lebih tepat dipahami sebagai kolaborasi lintas sektor untuk memberikan informasi dan mendukung kesejahteraan siswa. Apabila ditemukan persoalan kesehatan atau kondisi siswa yang memerlukan penanganan lebih lanjut, sekolah perlu memastikan adanya mekanisme komunikasi dan rujukan kepada pihak yang berwenang.

**2) Kerja Sama dengan Kepolisian**

Sekolah juga menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memberikan edukasi mengenai keamanan, ketertiban berlalu lintas, dan pencegahan kenakalan remaja. Kegiatan tersebut memberikan informasi kepada siswa mengenai pentingnya mematuhi aturan dan menjaga keselamatan diri. Kerja sama ini menunjukkan bahwa sekolah berusaha memperluas sumber informasi dan pendidikan sosial dengan melibatkan pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Dalam konteks BK, kegiatan tersebut mendukung fungsi pencegahan melalui pemberian pemahaman mengenai perilaku yang aman, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan. Namun, perlu dibedakan antara kegiatan penyuluhan dan penanganan kasus. Edukasi dari kepolisian merupakan kegiatan informatif dan preventif, sedangkan penanganan masalah perilaku yang kompleks tetap memerlukan koordinasi dengan pihak yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan siswa.

**3) Kerja Sama dengan Perpustakaan**

Upaya eksternal lainnya dilakukan melalui kerja sama dengan pihak perpustakaan. Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh perhatian sekolah terhadap minat baca siswa yang dinilai masih rendah. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi kunjungan dan peminjaman buku. Kegiatan tersebut bertujuan memperluas akses siswa terhadap bahan bacaan serta mendorong terbentuknya kebiasaan membaca. Dalam

kaitannya dengan BK, kegiatan ini dapat mendukung perkembangan aspek belajar, khususnya pengembangan kebiasaan belajar dan minat siswa terhadap kegiatan literasi.

Upaya tersebut memperlihatkan bahwa dukungan terhadap perkembangan siswa tidak hanya dilakukan melalui penanganan masalah, tetapi juga melalui penyediaan lingkungan yang mendorong pertumbuhan potensi. Meski demikian, peningkatan minat baca belum dapat dinyatakan sebagai hasil yang terbukti dari penelitian ini karena tidak ditemukan pengukuran perubahan minat baca sebelum dan sesudah kegiatan.

**4) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal sebagai Dukungan Sistem Layanan**

Secara keseluruhan, kerja sama dengan Puskesmas, Kepolisian, dan Perpustakaan menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya memanfaatkan sumber daya eksternal untuk memenuhi kebutuhan siswa. Bentuk kolaborasi tersebut mencakup edukasi kesehatan, informasi keamanan, serta pengembangan literasi. Akan tetapi, kerja sama yang ditemukan masih lebih banyak berbentuk pemberian informasi dan kegiatan edukatif. Data belum menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki sistem rujukan kasus BK yang formal, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kerja sama eksternal yang telah berjalan perlu dikembangkan lebih lanjut agar tidak hanya berfokus pada kegiatan penyuluhan, tetapi juga mendukung penanganan siswa yang membutuhkan bantuan khusus.

Penelitian (Nasrudin et al., 2025)menunjukkan bahwa kolaborasi antara wali kelas dan guru BK dapat memperkuat proses identifikasi permasalahan serta tindak lanjut layanan. (Syahrul, 2024) juga menekankan pentingnya koordinasi dan penguatan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas layanan di sekolah dasar. Sementara itu, (Purwaningrum et al., 2023) menunjukkan bahwa kerja sama dengan orang tua merupakan bagian penting dari dukungan terhadap perkembangan siswa.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Bimbingan dan Konseling (BK) di SD Negeri 12 Kota Ternate telah diupayakan oleh guru kelas, tetapi belum berjalan secara optimal dan terstruktur. Pelaksanaannya mencakup kegiatan orientasi, pemberian informasi, pendampingan pembelajaran, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan klasikal, konsultasi, mediasi, serta pemberian bantuan kepada siswa melalui kerja sama dengan pihak lain. Namun, sebagian besar kegiatan tersebut masih terintegrasi dengan proses pembelajaran dan pengelolaan kelas serta dilaksanakan secara informal dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Kegiatan belajar kelompok belum sepenuhnya mencerminkan layanan bimbingan kelompok yang terstruktur, sedangkan layanan konseling individual dan konseling kelompok secara formal belum terlaksana.

Keterbatasan pelaksanaan layanan BK dipengaruhi oleh beberapa kendala, yaitu belum tersedianya guru BK khusus, keterbatasan kompetensi guru kelas dalam teknik konseling, belum adanya ruang konseling dan instrumen asesmen standar, keterbatasan waktu guru, serta masih adanya siswa yang merasa takut untuk berkonsultasi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan fungsi BK sangat bergantung pada inisiatif dan kemampuan guru kelas sehingga penanganan kebutuhan siswa belum dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan sekolah untuk mengoptimalkan fungsi BK meliputi pendekatan personal kepada siswa, rencana penyediaan tenaga BK, serta kerja sama dengan pihak eksternal, seperti puskesmas, perpustakaan, dan kepolisian melalui kegiatan edukasi kesehatan, pengembangan pengetahuan, serta penyampaian informasi mengenai keamanan dan ketertiban. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan kompetensi guru kelas dalam memberikan pendampingan kepada siswa, penyusunan program BK yang terencana sesuai kebutuhan perkembangan siswa, penyediaan sarana konsultasi yang mendukung privasi dan kerahasiaan, serta pengembangan mekanisme rujukan kepada tenaga profesional apabila permasalahan siswa berada di luar kompetensi guru kelas. Temuan ini menggambarkan kondisi pelaksanaan fungsi BK di sekolah yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi kondisi seluruh sekolah dasar.

## Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala SD Negeri 12 Ternate yang berkenan memberikan izin untuk meneliti, Guru Wali Kelas III, IV, V serta siswa-siswi atas kesediannya untuk berpartisipasi dalam penelitian sehingga terlaksana dengan baik.

## Daftar Rujukan

Andriani, M. W., & Hariyani, Y. (2022). Pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap sosio-emosional siswa sekolah dasar. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, *8*(1), 41–47. https://doi.org/10.31602/jbkr.v8i1.6511

Bilqis, F. (2019). Pengembangan program layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan daya tarik interpersonal siswa kelas V Sekolah Dasar. *Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *2*(3), 123–133. https://doi.org/10.26539/teraputik.23113

Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, *41*(5), 545–547. https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547

Haryani, B. S. A., Adi, B. S., Kurniawati, & Aprilia, T. (2024). Analisis kebutuhan layanan bimbingan untuk mengembangkan resiliensi siswa sekolah dasar. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *8*(3), 1356–1362. https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i3.5167

Khoeriyah, F. (2024). Studi deskriptif tentang infrastruktur manajemen bimbingan konseling di tingkat sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, *18*(1), 81–92. https://doi.org/10.52434/jpu.v18i1.3326

Kurnianto, A. M. (2018). Pelaksanaan layanan dasar bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar se-Kota Semarang. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, *7*(4), 25–30. https://doi.org/10.15294/ijgc.v7i4.20040

Martanti, F. (2015). Peran guru kelas dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di SDN Watuaji 01 Kabupaten Jepara. *Magistra: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, *6*(2), 18–31. https://doi.org/10.31942/mgs.v6i2.1776

Milenda, S. S., & Muhroji, M. (2022). Layanan Bimbingan dan Konseling Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Basicedu*, *6*(3), 4869–4875. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2969

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.

Nasrudin, M., Fadillah, N. A. N., Rudianto, A., & Salahudin, A. (2025). Strategi Kolaboratif Wali Kelas dan Guru BK dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. *Realita Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *10*(2), 2934–2942. https://doi.org/10.33394/realita.v10i2.17420

Nichla, S., Attalina, C., Rofiqoh, N., Zumrotun, E., Nichla, S., & Attalina, C. (2023). Urgensi Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar Naili. *Jurnal Pendidikan Dasar : Jurnal Tunas Nusantara*, *5*(1), 538–546.

Nugroho, A. D., & Fathoni, A. (2022). Hambatan Guru Berlatar Pendidikan Non Bimbingan Konseling Sebagai Pelaksana Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, *6*(4), 5839–5846. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3136

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, *42*(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Pangestu, D. B., Umari, T., & Yakub, E. (2022). Layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. *Jurnal PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, *6*(5), 1622–1629. https://doi.org/10.33578/pjr.v6i5.8978

Prihatiningsih, M. I., Apriyansyah, C., Priyanti, N., Sukatmi, S., & Ismail, M. (2025). Hubungan antara Interaksi Sosial, Teman Sebaya, dan Perkembangan Bahasa Anak melalui Play-Based Learning. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *9*(5), 2251–2262. https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i5.7508

Purwaningrum, R., Surur, N., & Asrowi. (2023). Harmonisasi hubungan guru bimbingan dan konseling dengan orang tua melalui strategi kolaborasi: Systematic literature review. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, *12*(1). https://doi.org/10.15294/ijgc.v12i1.74559

Rahmawati, N. F., Ulfa, R. L., & Saadah, R. (2024). Pentingnya layanan bimbingan konseling di sekolah dasar terhadap perkembangan peserta didik. *Jurnal Ibtida*, *5*(2).

Rofiqoh, N., Zumrotun, E., & Attalina, S. N. C. (2023). Urgensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. *Tunas Nusantara*, *5*(1), 538–546. https://doi.org/10.34001/jtn.v5i1.4997

Sabillah, D. S., Chairunisa, C., & Maulana, F. F. (2024). TANTANGAN GURU BIMBINGAN KONSELING PADA KURIKULUM MERDEKA. *Cemara Education and Science*, *2*(3). https://doi.org/10.62145/ces.v2i3.84

Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health*, *23*(4), 334–340. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:43.0.CO;2-G

Santika, A. N., Ridho, A. A., Safira, A. R., & Nurfadila, A. (2024). Dampak dari kurangnya sarana yang memadai bagi guru BK dalam pelaksanaan pelayanan konseling di sekolah. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, *18*(2). https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.5899

Sukadari. (2021). Guru bimbingan dan konseling di sekolah dasar sangat dibutuhkan. *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An*, *8*(1), 67–74. https://doi.org/10.31316/esjurnal.v8i1.1204

Syahrul, M. (2024). Implementasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar: Studi kasus pada SD Inpres Mallengkeri Bertingkat. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, *8*(3). https://doi.org/10.26858/jkp.v8i3.90284